

**ILMU PEMERINTAHAN  
BERKARAKTER INDONESIA  
PERSPEKTIF KEPAMONGPRAJAN**

## **Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta**

### **Lingkup Hak Cipta**

#### **Pasal 2**

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Ketentuan pidana**

#### **Pasal 72**

1. Barang siapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**ILMU PEMERINTAHAN  
BERKARAKTER INDONESIA  
PERSPEKTIF KEPAMONGPRAJAN**

**Muhadam Labolo, dkk (Editor)**



**EL-MARKAZI**  
publish your dream with a book

# ILMU PEMERINTAHAN BERKARAKTER INDONESIA PERSPEKTIF KEPAMONGPRAJAAN

*Penulis :*

Muchlis Hamdi, Asrifai, Andi Azikin, Utang Suwaryo, Bahrullah Akbar,  
Achmad Djazuli, Nizam Burhanudin, Galih Kurniawan Sidik, Eki  
Darmawan, Arwanto H. Ginting, Rizki Amalia, Petrus Polyando,  
Muhadam Labolo, Cahyo Hatta Murtyoso, Tjahjo Suprajogo, Hasna  
Azmi Fadhilah, Sadu Wasistiono, Halilul Khairi, Adfin Rochmad  
Baidhowah, Anderiasta Tarigan , Meliasta Hapri Tarigan

*Editor :*

Muhadam Labolo, Florianus Aser, Sutiyo, Heru Sulistiyo, Wangsih,  
Ikhbaluddin, Siti Zulaika, Hasna Azmi Fadhilah, Arwanto, Teguh Ilham

*Desain Cover :*

**EI - Markazi**

*Tata Letak :*

**EI - Markazi**

Ukuran :

**xlii, 393 hlm, Uk: 14,8 cm x 21 cm**

**ISBN : 978-623-6865-79-8**

**Cetakan Pertama :**

November 2020

Hak Cipta 2020, Pada Penulis

---

Isi diluar tanggung jawab percetakan

---

**Copyright © 2020 by Elmarkazi Publisher**

All Rights Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT ELMARKAZI**

Anggota IKAPI

Jl.RE.Martadinata RT.26/05 No.43 Pagar Dewa,

Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu 38211

Website: [www.elmarkazi.com](http://www.elmarkazi.com) dan [www.elmarkazistore.com](http://www.elmarkazistore.com)

E-mail: [elmarkazipublisher@gmail.co](mailto:elmarkazipublisher@gmail.co)

## Bab 8. Saatnya Ilmu Pemerintahan Beraksi

Oleh: Petrus Polyando

### 8.1 Pengantar

Perkembangan ilmu pemerintahan sebagai sebuah ilmu yang mandiri dan otonom, pada awal mulanya melalui proses yang sulit, berliku-liku, dan mengalami anomali (Wasistiono dan Simangunsong, 2015). Bahkan, pada awal abad ke-19 oleh sebagian kalangan menyatakan ilmu pemerintahan berada dalam krisis paradigma (*golembiewsky*) (Ostrom dalam Van Bram) atau dianggap masih berada dalam pre-paradigma (van Braam, tt). Argumentasi ini tentu berangkat dari fakta empiris kehadiran ilmu pemerintahan di tengah perkembangan ilmu-ilmu lainnya dan juga di tengah tuntutan akan eksistensi ilmu pemerintahan sebagai solusi bagi persoalan bangsa dan negara. Ilmu pemerintahan yang sejatinya hadir menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang dapat menyelaraskan keadaan yang kacau balau menjadi sesuatu yang diinginkan manusia Roosevelt (1841: 7) serta menjadi ilmu yang memimpin hidup bersama manusia ke arah kebahagiaan yang sebesar-besarnya tanpa merugikan orang lain secara tidak sah Van Poeltje (1953: 28) justru belum tampak perannya. Seringkali bangsa ini dilanda krisis multidimensi yang membutuhkan kehadiran berbagai bidang ilmu

pengetahuan untuk mengambil peran solusional, namun posisi ilmu pemerintahan belum terlihat jelas di sana sebagaimana sejatinya dihadirkan. Beragam persoalan pemerintahan muncul dan menggunung dari waktu ke waktu, seakan tidak tersentuh benang solusinya. Persoalan pemerintahan tersebut spesifiknya selalu berkenaan dengan aktivitas memerintah dan perilaku para pihak yang diberikan mandat memerintah serta dinamika relasi yang dibangun, baik hubungan pemerintah dan yang diperintah maupun internal kelembagaan pemerintah. Dalam banyak kasus tampilan pemerintahan seakan tidak melalui desain ilmu memerintah yang berdasarkan penalaran-penalaran ilmiah pemerintahan. Tanpa mengurangi catatan kelam dinamika persoalan pemerintahan sebelumnya, namun contoh terkini ketika menghadapi persoalan wabah Covid-19, pemerintah seakan tidak berdaya dalam berbagai aspek. Kurangnya koordinasi antar-instansi, kurangnya sinergitas kerja antarlevel pemerintahan, bahkan pemerintah seakan bingung mengatasi keluhan kebutuhan masyarakat. Hal ini kemudian menimbulkan banyak kritik dan banyak catatan yang berujung pada argumentasi, di manakah solusi yang semestinya dari ilmuwan-ilmuwan pemerintahan?

Fakta kondisi persoalan pemerintahan yang menggunung menunjukkan ilmuwan pemerintahan belum berfungsi sebagaimana mestinya. Ilmu pemerintahan yang dikonsepsikan menjadi penyelaras oleh Roosevelt (1841: 7)

maupun sebagai memimpin hidup bersama manusia ke arah kebahagiaan sebagaimana yang digagas Van Poeltje (1953: 28) justru belum terlihat manfaatnya. Para ilmuwan pemerintahan seakan hilang ide besarnya, surut tawaran metodenya, serta lenyap gagasan solusionalnya di tengah banyak persoalan yang membutuhkan solusi dari ilmu pemerintahan. Bahkan, ilmuwan pemerintahan seakan melebur pada bidang ilmu pengetahuan lainnya demi kepentingan pragmatis dan oportunistik individual maupun kelompok kecil. Hal inilah yang membutuhkan keterpanggilan para ilmuwan pemerintahan sebagai pengawal kebenaran ilmu pemerintahan untuk bangkit memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara. Era *new norm* dan *new normal* akibat pandemi wabah Covid-19 ini, menjadi momentum yang tepat menghadirkan ilmu pemerintahan beraksi mencapai tujuannya.

## **8.2 Dinamika Peran Ilmu Pemerintahan**

Kehadiran ilmu pemerintahan, sebagaimana juga berlaku bagi ilmu-ilmu lainnya, semestinya bermuara pada semangat menyelesaikan persoalan hidup manusia masa lalu, kini, dan yang akan datang. Konsep utamanya bahwa pengetahuan ilmiah itu dibangun dengan tujuan untuk memecahkan problem-problem ilmiah. Tentu argumentasi ini sejalan dan sebangun dengan pemahaman publik akan ilmu pengetahuan sosial pada umumnya yang akan terus ada dan

berkembang selama hidup manusia sebagai makhluk sosial. Dalam konteks ilmu pemerintahan pun, perannya akan terus ada memberikan pengenalan memerintah secara ilmiah berdasarkan norma-norma tertentu, metode khusus atau teknik tertentu, berhubungan dengan mutu tertentu dan dapat dipertanggungjawabkan menurut ukuran-ukuran tertentu (van Braam, tt).

Berkenaan dengan peran ilmu pemerintahan, sejatinya bisa dilihat dalam dua hal utama, antara lain praktik penyelenggaraan pemerintahan dan juga konsep-konsep penyelenggaraan pemerintahan yang lahir dari ilmuwan pemerintahan. Gambaran kedua hal ini bisa dilihat dalam satu sejarah peradaban sebuah bangsa, namun bisa juga dilihat pada periodisasi waktu tertentu. Pilihan penilaian tergantung pada kebutuhan analisis dan kepentingan para pihak berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Dalam kesempatan kali ini ruang analisis difokuskan pada masa reformasi, di mana pertimbangannya lebih kepada hadirnya kebebasan berekspresi dan berpendapat bagi siapa saja, termasuk ilmuwan untuk melahirkan karya-karyanya secara merdeka tanpa tekanan rezim kekuasaan secara otoriter.

*Pertama*, praktik penyelenggaraan pemerintahan. Dinamika penyelenggaraan pemerintahan pada masa reformasi ini diwarnai dengan hadirnya beragam bentuk, beragam pola perilaku interaksi antara aktor yang memegang amanat memerintah dan masyarakat yang memberikan

amanat. Interaksi tersebut sejatinya menuju pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi masyarakat secara adil. Namun demikian, fakta menunjukkan hal tersebut belum terwujud di sebagian besar daerah di Indonesia. Sebagian masyarakat masih mengeluh, masih berjuang dengan kesulitan pemenuhan kebutuhan dasarnya, serta masih berada dalam kondisi keprihatinan. Di sisi lain, sebagian kelompok masyarakat atau bahkan sebagian elit hidup dalam kemewahan dengan melakukan praktik kotor. Para penyelenggara pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, seakan berlomba menampilkan perilaku buruk dalam tata kelola pemerintahan. Hal ironis ini menunjukkan nilai-nilai positif yang dihadirkan ilmu pemerintahan mengenai dasar memerintah secara ilmiah demi kepentingan hidup orang banyak secara adil tanpa merugikan pihak lain, belum terealisasi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Seringkali penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan cara mendominasi nilai kekuasaan di mana setiap aktivitas pemerintahan lebih kepada kepentingan kekuasaan sebagian elit baik dalam konteks merebut kekuasaan itu maupun mempertahankannya. Ini berarti semakin melanggengkan berkembangnya praktik ilmu politik pada penyelenggaraan pemerintahan. Akibatnya, sulit mencapai tujuan sebagaimana yang dibawa oleh ilmu pemerintahan. Pada kondisi seperti ini dapat dinilai bahwa ilmu

pemerintahan belum mendalam, belum bekerja, atau belum berfungsi secara baik dan benar.

*Kedua*, konsep-konsep penyelenggaraan pemerintahan. Sejatinya penyelenggaraan pemerintahan itu berdasarkan sebuah ide besar atau gagasan konseptual yang terstruktur dan tersistematis, dari mana memulainya, ke mana tujuannya, apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, dan siapa yang melakukannya. Konsep ini tentu berasal dari para cerdas pandai, para sarjana, atau para ilmuwan yang memfokuskan dirinya pada kajian-kajian ilmiah pemerintahan. Beragam fenomena pemerintahan semestinya diselesaikan dengan pendekatan ilmu pemerintahan yang lahir dari beragam konsep para ilmuwan pemerintahan. Namun, pada kenyataan selama masa reformasi ini, konsep-konsep yang ditawarkan ilmuwan pemerintahan masih sangat langka menjadi rujukan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Klaim model terbaik bagi penyelenggaraan pemerintahan yang berasal dari konsep ilmuwan pemerintahan dan juga kesuksesannya masih *debateble* di antara ilmu-ilmu lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa karya ilmiah yang lahir dari penelurusan ilmiah pemerintahan belum berhasil mengambil posisi atau berkontribusi bagi bekerjanya tata kelola pemerintahan yang efektif. Pemerintahan yang efektif dimaksud sesungguhnya berkenaan dengan gagasan bahwa pemerintahan yang tidak hanya melindungi warganya dari kekerasan, tetapi juga

mendorong pertumbuhan ekonomi, menyediakan barang-barang publik yang dibutuhkan dan diinginkan penduduk, mengembangkan mekanisme pertanggungjawaban rakyat, dan memastikan kesetaraan politik dan ekonomi (Levi, 2006). Ini berarti konsep-konsep mengenai poin-poin tersebut semestinya meramalkan dinamika tata kelola pemerintahan.

Dari gambaran kedua dimensi tersebut, tampak bahwa ilmu pemerintahan pada masa reformasi ini belum berperan secara struktural dalam identitas yang konkret dan jelas. Padahal, ruang bebas nilai bagi ilmuwan telah dibuka luas, termasuk ilmuwan pemerintahan. Kondisi ini menunjukkan ada sejumlah persoalan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, sehingga ilmu pemerintahan tidak terlihat atau bahkan dikatakan mati suri. Persoalan internal berkenaan dengan dinamika interaksi internal ilmuwan pemerintahan, sedangkan persoalan eksternal dimaksud lebih kepada interaksi antara ilmuwan pemerintahan dengan ilmuwan lainnya.

### **8.3 Persoalan Internal dan Eksternal Ilmu Pemerintahan**

Melanjutkan diskusi alinea sebelumnya mengenai temuan adanya persoalan yang dihadapi ilmu pemerintahan maka secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut.

***Persoalan internal*** yang terjadi di antara ilmuwan pemerintahan adalah belum sepakatnya posisi ilmu pemerintahan itu sendiri. Konteks ini berkaitan dengan objek materi dan objek formal, yang kemudian berkembang pada penerimaan terhadap kemandirian ilmu pemerintahan. Ada yang masih menyatakan ilmu pemerintahan tersebut sebagai bagian dari bidang kajian ilmu politik, ada yang menyatakan bagian dari ilmu administrasi negara, kemudian ada yang menyatakan bahwa ilmu pemerintahan tersebut telah menjadi ilmu yang mandiri, karena telah memenuhi syarat ontologi, epistemologis, dan aksiologis. Perdebatan ini terus berlangsung pada tiga domain ini, bahkan lebih mengerucut lagi ilmuwan yang sepakat dengan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mandiri pun masih bertarung gagasan mengenai tiga aspek: ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Hal ini kemudian memunculkan gagasan mengenai aliran-aliran baru di dalam ilmuwan pemerintahan di luar kedua aliran/mazhab yang berpengaruh besar, yaitu Anglo-Saxon dan Eropa Kontinental seperti mazhab Timoho Sutoro Eko (2020). Beberapa ilmuwan berusaha meletakkan mazhab ilmu pemerintahan yang berkarakter Indonesia seperti halnya *Kybernologi* Ndraha (2003) dan para pengikutnya.

Perilaku ini menunjukkan dinamika internal ilmuwan pemerintahan yang belum saling menerima, belum saling mendukung, dan belum saling sepakat apa yang hendak dijadikan dasar dan arah pengembangan konsisten ilmu

pemerintahan. Kalau merujuk pemahaman Karl R. Popper (1974), perbedaan ini sesungguhnya menjadi arena positif yang bisa menjadikan lahan tumbuh dan berkembangnya ilmu pengetahuan itu sendiri. Namun demikian, berdampak pada kebingungan ilmuwan pemerintahan maupun para pembelajar ilmu pemerintahan dalam meletakkan arah pengembangannya. Terutama bagi mereka yang sedang menggeluti atau sedang meletakkan prinsip-prinsip bernalar ilmiah pemerintahan selain mereka yang berdasarkan mazhab ilmu pemerintahan baru *kybernologi*. Munculnya aliran baru dengan corak yang berbeda menimbulkan kelompok pendukung yang beragam. Bagi para pendukung *kybernologi*, tentunya menjadi catatan evaluasi sejauh mana peran para *kybernologist*, *kybernolog*, dan *koki*, Ndraha (2003) membumikan gagasan utama dari *kybernologi* tersebut dalam pengembangannya sebagai sebuah karya ilmu pemerintahan yang berkarakter Indonesia.

Dialektika yang melahirkan ragam aliran ini, meskipun positif menghadirkan banyak ilmuwan pemerintahan dengan berbagai konsep dan gagasan ilmu pemerintahan, namun semestinya ada ruang refleksi terhadap *kybernologi*. Dalam konteks ini sebagai nilai kritik terhadap kemampuan *kybernologi* menjawab perubahan sosial kekinian. Gagasan utamanya mendeskripsikan kembali peran *kybernologi* di tengah masyarakat ilmuwan, mengukur tingkat penerimaan masyarakat terhadap *kybernologi*, dan

meletakkan titik-titik krusial temuan yang patut dan layak menjadi bahan penentuan kembali posisi *kybernologi*. Dengan berbagai ritual ini, baru sepatutnya ilmuwan pemerintahan memberanikan diri menyatakan pilihannya, yaitu meneruskan *kybernologi* dengan mengikuti gaya kekinian, sehingga dapat dibumikan pada setiap generasi. Ataukah menempatkan *kybernologi* hanya sebagai sebuah kisah masa lalu yang sudah tidak sesuai lagi dengan zaman sekarang dengan berbagai alasan rasionalnya.

Hadirnya beberapa paham baru, gagasan baru, atau aliran baru ilmu pemerintahan tanpa saling mengevaluasi dan mengkritik satu sama lainnya, bahkan tanpa sepakat membangun ilmu pemerintahan yang bisa dibumikan, memperlihatkan ilmuwan pemerintahan berada dalam ruang abu-abu. Banyak perspektif yang muncul, sehingga corak ilmu pemerintahan pun berbeda antar-ilmuwan pemerintahan sendiri. Di sinilah salah satu titik permasalahan yang menjelaskan ilmu pemerintahan belum jelas wujudnya mengambil peran dalam mengatasi persoalan pemerintahan yang multidimensi. Inilah yang semestinya menjadi catatan bagi ilmuwan pemerintahan mengenai dampak problem internal terhadap ilmu pemerintahan.

***Persoalan eksternal.*** Hal ini berkaitan dengan pengakuan ilmuwan lainnya terhadap eksistensi ilmu pemerintahan. Pada taraf ini sorotannya lebih kepada penghargaan akan keberadaan ilmu pemerintahan dan

wilayah studinya. Sejauh mana ilmu pemerintahan diberikan kesempatan dan kapan ilmu pemerintahan tidak diabaikan perannya oleh ilmuwan lainnya, terutama ilmu yang memiliki irisan dengan ilmu pemerintahan. Jawaban terhadap pertanyaan reflektif tersebut sesungguhnya akan menunjukkan wujud ilmu pemerintahan dan peran konkretnya dalam memberikan kontribusi terhadap persoalan bangsa dan negara.

Sehubungan dengan pengakuan ruang dan waktu peran ilmu pemerintahan beraksi dalam menyelesaikan fenomena sosial pemerintahan pada masa reformasi ini tampak belum utuh didapatkan. Meski sebagian kalangan ilmuwan menyatakan letak posisinya, namun tidak sedikit ilmuwan lainnya yang abai terhadap keberadaan ilmu ini. Terhadap yang abai akan keberadaan ilmu pemerintahan ini kemudian menempatkan persoalan atau fenomena pemerintahan ke dalam ilmu politik atau ilmu administrasi negara sebagai tempat menjawab persoalan pemerintahan tersebut. Tentu hal ini menjadi perdebatan yang tidak berujung, manakala jawaban yang ditunjukkan ilmuwan pemerintahan hanya sebatas pendapat atau opini. Pada posisi ini semestinya temuan-temuan atau karya-karya ilmuwan pemerintahan memperlihatkan secara jelas letak atau titik bidiknya yang membedakan dengan ilmuwan yang lainnya dan menempatkan wujud pencapaian tujuannya sebagai

kontribusinya terhadap persoalan pemerintahan yang menggunung tersebut.

Fakta empiris belum adanya pengakuan secara utuh menunjukkan pekerjaan-pekerjaan ilmuwan pemerintahan belum spesifik pada bidang kajian yang konkret dan khas. Kondisi itu tentu berdampak kepada relasi ilmu pemerintahan dengan para pengikutnya, para penyelenggara pemerintahan, dan juga kepada masyarakat. Konkretnya, ketika muncul beberapa persoalan penyelenggaraan pemerintahan, para pembelajar ilmu pemerintahan lebih cenderung menganalisis dengan menggunakan kaca mata ilmu kenegaraan lainnya, seperti ilmu politik atau ilmu administrasi. Para penyelenggara pemerintahanpun cenderung akan memfasilitasi berkembangnya ilmu kenegaraan lainnya yang beririsan dengan ilmu pemerintahan ketika tidak diyakinkan keberadaan ilmu ini. Bagi masyarakat luas, dampak pengakuan ini akan mengubah tingkat penerimaan dan juga semangat meneruskan ilmu memerintah secara ilmiah dari generasi ke generasi. Dengan posisi sekarang, masyarakat cenderung mengenal ilmu pemerintahan identik dengan kekuasaan dan menyelenggarakan proses administrasi saat berkuasa. Di sinilah persoalan timbul dan menyebabkan ilmu pemerintahan yang awalnya dihadirkan sebagai *primus inter pares* atau ilmu yang nomor satu di antara ilmu-ilmu sesamanya dan menonjol dalam berbagai hal Surianingrat

(1992), tampak tidak berdaya bahkan diletakkan di bawah bayang-bayang ilmu lainnya tersebut.

#### **8.4 Jalan Tengah Bagi Ilmuwan Pemerintahan**

Mengingat beberapa catatan peran ilmuwan pemerintahan dan persoalan yang dihadapinya, maka perlu digagas solusi yang bisa menjadi sikap ilmuwan pemerintahan. Konsep ini sebagai suatu poin konsolidatif yang membangkitkan semangat ilmuwan pemerintahan untuk melihat ke dalam, menemukan identitas dirinya, lalu mengukur keberadaannya, terutama perannya selama reformasi ini. Selanjutnya, menjadi pelecut rasa percaya diri ilmuwan pemerintahan agar tetap sepekat pada ilmu yang mandiri dan otonom.

Momentum era *new norm* atau era *new normal* akibat pandemi wabah Covid-19, menjadi pilihan tepat beraksi bagi ilmuwan pemerintahan untuk mengukuhkan jati diri ilmu pemerintahan secara lugas dan tegas. Bahwa era *new norm* yang menghadirkan kebiasaan baru bagi masyarakat menjadi saat yang tepat bagi ilmu pemerintahan melangkah pasti menuju tujuan yang telah digagas pendahulu dan mengembalikan kejayaan sebagai *primus inter pares*. Penyebaran wabah Covid-19 menjadi titik balik bagi ilmuwan pemerintahan menentukan langkah besar bagi kontribusinya terhadap bangsa dan negara. Tentu semangat ini seiring dengan beberapa opini publik tentang ujian Covid-19 pada

suatu negara yang mencakup sistem layanan kesehatan, efektivitas pemerintahan dan modal sosial masyarakat. Jadi, dengan melihat fakta sosial maupun efektivitas penyelenggaraan pemerintahan pada masa pandemi ini, kepekaan ilmuwan pemerintahan digugah untuk hadir menjadi bagian dari solusi. Konkretnya, menyiapkan desain aksi secara komprehensif yang berangkat dari catatan pada masa lalu, kondisi riil masa kini dan semangat pencapaian di masa depan.

Berkenaan dengan pemahaman tersebut, maka dapat disajikan beberapa hal sebagai jalan tengah bagi ilmuwan pemerintahan sebagai berikut.

*Pertama*, ilmuwan pemerintahan semestinya sepakat pada posisi ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mandiri dan otonom. Hal ini menjadi penting mengingat pada gagasan besar kehadiran ilmu pemerintahan yang dikemukakan beberapa ilmuwan terdahulu pada beberapa literatur, sejarah, dan juga catatan perjuangan ilmuwan terdahulu. Pada posisi pertama ini ilmuwan pemerintahan meneguhkan kematangan dan kemandirian bernalar secara ilmiah pemerintahan tanpa berada di bayang-bayang ilmu lainnya, terutama yang sejenis.

*Kedua*, ilmuwan pemerintahan perlu menetapkan mazhab khas yang berkarakter Indonesia sebagai arah pengembangan yang jelas bagi pembelajar ilmu pemerintahan dari generasi ke generasi. Gagasan ini tentu

berkenaan dengan upaya menentukan wilayah kajian atau menetapkan ruang studi yang jelas, sehingga kelak mengambil posisi yang pas bagi penyelesaian persoalan bangsa yang sangat kompleks dan multidimensional.

*Ketiga*, sehubungan dengan mazhab ilmu pemerintahan yang berkarakter Indonesia, *kybernologi* yang menjadi mahakarya anak bangsa yang telah meletakkan jati diri ilmu pemerintahan yang sesungguhnya perlu dibumikan secara masif kepada masyarakat ilmuwan maupun kepada khalayak publik lainnya. Untuk itu, momentum pandemi Covid-19 yang membawa pada hadirnya era *new norm*, dijadikan titik konsolidasi, evaluasi, sekaligus melahirkan langkah konkret bagi penentuan arah pengembangan *kybernologi*. Hal ini berangkat dari ide besar *kybernologi* yang sesungguhnya telah mengakomodasi seluruh nilai-nilai ilmu pemerintahan pada masa lalu, praktik-praktik pemerintahan kekinian, dan juga nilai-nilai prediktif ke depannya. Jadi, sesungguhnya *kybernologi* masih sangat relevan hadir menjadi jawaban atas persoalan pemerintahan yang terjadi.

*Keempat*, berkenaan dengan pendekatan dalam menghadirkan ilmu pemerintahan di tengah gejolak persoalan masyarakat yang semakin mengggung, maka gagasan mengenai pembumian ilmu pemerintahan baik *bestuurswetenschap* maupun *bestuurskunde* menjadi semangat yang perlu digalakan bagi ilmuwan pemerintahan. Keduanya berkenaan dengan ilmu pemerintahan dan ilmu

pemerintahan terapan yang sesungguhnya memiliki peran yang sama, berkolaborasi bagi penyelesaian persoalan bangsa. Untuk itu, perlu diletakkan langkah-langkah konkret merealisasikan semangat tersebut, terutama berhubungan dengan upaya menyeimbangkan keduanya bagi jalan berpikir ilmuwan pemerintahan yang sesungguhnya. Dengan demikian, tidak terjadi kekosongan sebagian atau terjadi dominasi peran antara *bestuurswetenshap* dan *bestuurskunde* dalam bernalar memerintah secara ilmiah.

*Kelima*, sebagai tindak lanjut atas pembumian *bestuurswetenshap* dan *bestuurskunde* melalui *Kybernologi*, maka IPDN yang telah menegaskan *core-science*-nya, ilmu pemerintahan semestinya mengambil peran mengembalikan jati diri ilmu pemerintahan. Hal ini mengingatkan IPDN saat ini terkesan lebih cenderung kepada pengembangan *bestuurskunde* dan belum kepada *bestuurswetenshap*. Barangkali persoalan ini merupakan catatan kekeliruan sejarah masa lalu yang lupa diakomodasi. Ketika ada IIP dan STPDN, semangat pembumian *bestuurswetenshap* berada di IIP dan untuk *bestuurskunde* diletakkan pada STPDN yang melahirkan Sarjana Sains Terapan Pemerintahan. Namun, ketika ada penggabungan STPDN ke dalam IIP dan menjadi IPDN, semangat *bestuurskunde* tetap saja melekat hingga kini dan *bestuurswetenshap* seolah mati suri. Adapun pengembangannya di Kampus Cilandak dengan hadirnya

Sarjana Ilmu Pemerintahan, namun masih minor dibanding Sarjana Sains Terapan Pemerintahan.

*Keenam*, sehubungan peran yang digagas tersebut, maka saatnya ilmuwan pemerintahan IPDN merumuskan langkah konkret perbaikan pendidikan, baik pada penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi yang berbasis ilmu pemerintahan dan ilmu pemerintahan terapan maupun manajemen pendidikan berbasis pada kebutuhan *user* maupun harapan publik. Untuk mewujudkannya, maka perlu ada *grand design* baru penyelenggaraan pendidikan dengan mengevaluasi praktik sebelumnya, melihat kembali perannya saat ini dan harapan publik. Kemudian juga menyesuaikan dengan dinamika sosial yang berkembang saat ini, terutama berkenaan dengan hadirnya revolusi industri 4.0 dan kedaruratan akibat pandemi. *Grand design* ini tentu menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pendidikan agar konsisten mencapai tujuan, sehingga diperlukan komitmen bersama.

*Ketujuh*, dengan memperhatikan poin-poin sebelumnya, maka ilmuwan pemerintahan dapat semakin percaya diri berkiprah dan berkontribusi secara total bagi kemajuan bangsa. Ilmuwan pemerintahan tidak lagi sekadar berwacana, tetapi saatnya mengeksekusi secara logis dengan nalar ilmu pemerintahannya. Di sinilah ilmuwan pemerintahan akan bekerja secara sistematis, terukur, dan terencana. Tidak parsial dan tidak insidental tiba masa tiba akal. Dengan demikian secara perlahan akan membawa

kemanfaatan ilmu pemerintahan sebagaimana yang telah diletakkan para pendahulu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Clinton, Roosevelt. 1841. *The Science Of Government, Founded On Natural Law*. New York: published by Dean & Trevett, 121 Fulton Street, page 8.
- Eko, Sutoro. 2020. *Dekolonisasi Ilmu Pemerintahan*.
- Levi, Margaret. 2006. *Why We Need a New Theory of Government*. VL-4DOI10.1017/S1537592706060038, Perspectives on Politics.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1-2*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Poeltje, Van. 1953. *Pengantar Umum Ilmu Pemerintahan*. Tjetakan Kedua, dibahasaindonesiakan oleh B. Mang Reng Say, N.V. Soeroengan Petjenongan 58 – Djakarta
- Popper, K.R.1974, *Objective Knowlege: An Ervolutionary Approach*, Oxford: Clarendon Press.
- Surianingrat, Bayu. 1992. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Penerbit Rineka Cipta.
- Van Braam. *Filsafat Ilmu-Ilmu Pemerintahan, (filosofie van de bestuurswetenschappen)*. Hal. 67.
- Wasistiono, Sadu dan Fernandes Simangunsong. 2015. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jatinangor: IPDN Press.

